



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA JAMBI
2015**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-4
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-5
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-9
2.1.4 Aspek Daya Saing	II-24
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD	II-29
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-55
2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah	II-55
2.3.2 Urusan Pemerintah Daerah	II-59
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.....	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1. Proyeksi keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaann	III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-13
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-15
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Pembangunan	IV-4
4.3 Program Prioritas Pembangunan dan Kegiatan.....	IV-5
BAB V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016	
	V-1
BAB VI P E N U T U P	VI-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
2.1	Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2011.....	II-3
2.2	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.....	II-4
2.3	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	II-5
2.4	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku	II-6
2.5	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan	II-6
2.6	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 s.d Tahun 2014	II-7
2.7	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-7
2.8	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015.....	II-8
2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015	II-9
2.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kecamatan	II-10
2.11	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-10
2.12	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 Menurut Kecamatan	II-11
2.13	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-12
2.14	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 Menurut Kecamatan.....	II-12
2.15	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-21
2.16	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-22
2.17	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015	II-22
2.18	Angka Kosumsi RT perkapita Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-24
2.19	Persentase Kosumsi RT Non Pangan Tahun 2011 s.d Tahun 2015.....	II-25
2.20	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d Tahun 2015.....	II-25
2.21	Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-26
2.22	Jumlah Demo Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-26
2.23	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d Tahun 2015.....	II-27

2.24	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d Tahun 2015	II-27
2.25	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-28
3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013	III-3
3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan	III-7
3.3	Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2013 dan Tahun 2014	III-10
3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	III-10
3.5	Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS Tahun 2013 dan Tahun 2014	III-11
3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja	III-15
3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah	III-17
4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Jambi.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-4
4.3	Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016	IV-6
5.1	Matrik Rencana Program dan Kegiatan.....	V-2

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Diagram Alur Penyusunan RKPD Tahun 2016	I-2
2.1 Peta Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2011	II-3
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Berdasarkan PDRB Kota Jambi (harga konstan) Tahun 2000.....	III-2
3.2 Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2013 Berdasarkan Harga Berlaku menurut lapangan usaha	III-4
3.3 Inflasi Kota Jambi Tahun 2008– 2013	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah implikasinya kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

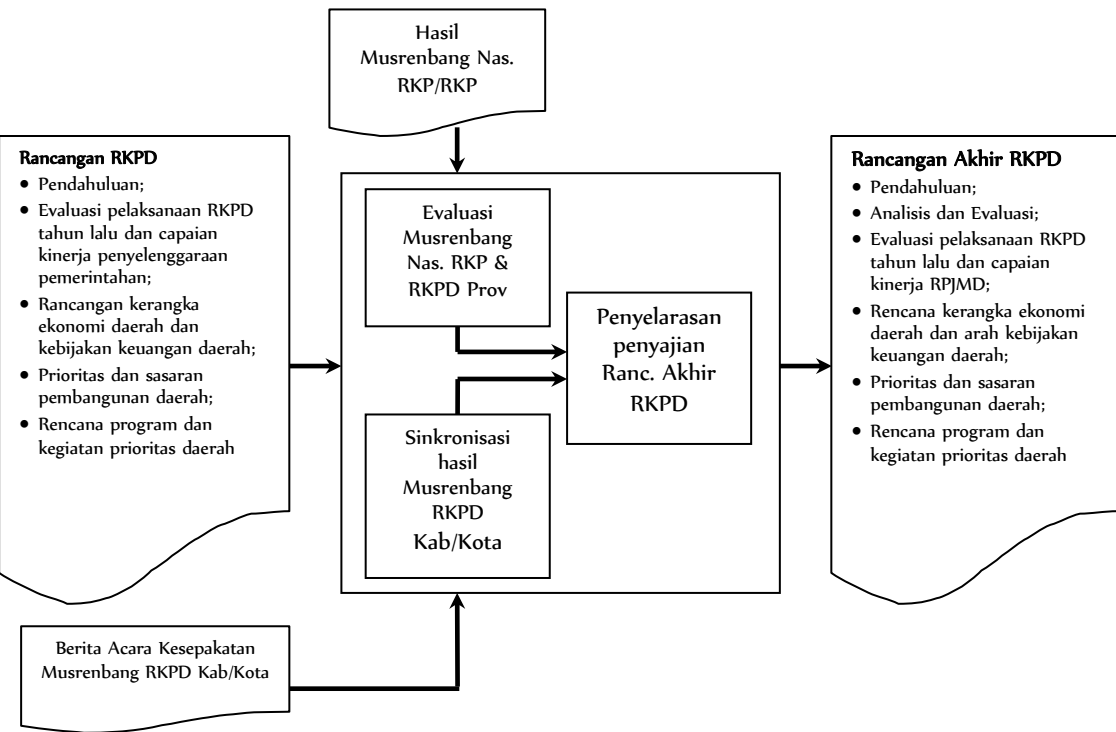
Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan RAPBD Kota Jambi Tahun 2016, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam penyusunan RKPD tahun 2016 ini telah disusun berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2013-2018. Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Diagram alur penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2016

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2016 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 -2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan

di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
 - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

5.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

BAB VI P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Jambi, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada RPJMD 2013-2018, evaluasi pembangunan tahun 2014 dan tahun berjalan 2015, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kota Jambi tahun 2013–2018 :

” TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 5 Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah.
3. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (*Clean Governance*).
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

MISI		TUJUAN		SASARAN
I	Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	1	Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. 2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
		2	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman.	3. Terbangun dan terpeliharanya terminal angkutan umum.
		3	Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan.	4. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 5. Penataan kawasan sepadan sungai. 6. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.
II	Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah	4	Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.	7. Penguatan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Usaha 8. Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi. 9. Penguatan sistem dan akses permodalan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 10. Meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dikalangan generasi muda terdidik. 11. Pelayanan gratis untuk promosi produk unggulan pengusaha UMKM. 12. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional modern. 13. Peningkatan iklim yang kondusif dan kepastian hukum bagi aktivitas dunia usaha. 14. Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perizinan.
III	Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.	5	Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.	15. Peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata
		6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan.	16. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
		7	Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama	17. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

MISI		TUJUAN		SASARAN
		8	Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja	18. Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan Kerja 19. Perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran
		9	Peningkatan Kesejahteraan Gender di semua aspek pembangunan	20. Peningkatan pengarusutamaan gender di berbagai aspek Pembangunan 21. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan 22. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas
IV	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (<i>Clean Governance</i>).	10	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government)	23. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) 24. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional 25. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, air bersih, kependudukan/catatan sipil dan lingkungan hidup 26. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik 27. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan dan RT
V	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.	11	Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	28. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 29. Terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat 30. Menurunnya jumlah penduduk miskin 31. Memperkuat peran pemuda dan olah raga 32. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya 33. Terwujudnya Pengembangan nilai-nilai budaya daerah 34. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata 35. Terberdayakannya kelompok-kelompok sosial masyarakat 36. Terberdayakannya lembaga adat dan rumah-rumah tradisioanl sebagai simbol budaya

Pembangunan Kota Jambi dalam konteks regional di era otonomi saat ini menjadi salah satu isu strategis mengingat Kota Jambi terbuka terhadap wilayah disekitarnya disamping peranannya sebagai pusat pertumbuhan yang

ditunjang dengan kelengkapan infrastruktur pelayanan, mendorong migrasi penduduk dari wilayah disekitarnya.

Disatu sisi peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya menuntut adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan, sedangkan disisi lain tidak mungkin Pemerintah Kota dengan segala keterbatasan dana dan sumber daya lingkungan, diharapkan akan menyediakan fasilitas pelayanan tersebut secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dengan wilayah disekitarnya dalam perumusan kebijakan secara terpadu.

Dari uraian tersebut di atas maka salah satu isu strategis dalam pembangunan Kota Jambi adalah tingkat pelayanan publik baik yang berskala regional maupun kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu mencakup pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, bidang transportasi kota, kebersihan dan keindahan lingkungan, air bersih, air kotor, banjir, tata ruang (kawasan konservasi) dan sebagainya.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2016 dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
3	Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Pengembangan Ekonomi dan Investasi
4	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan
5	Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup
6	Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial

4.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2013–2018. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2013–2018, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Jambi yaitu :

- (1) Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur,
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,
- (3) Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi,
- (4) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
- (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
- (6) Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Sosial.

Secara lebih rinci prioritas pembangunan, prioritas sasaran, kegiatan, program, sasaran program, indikator dan target kinerja dari masing-masing SKPD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Kegiatan	Program / Pembangunan	Sasaran	Kinerja		SKPD
					Program	Indikator	Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA							
	1.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pembinaan Lembaga PAUD	APK PAUD, Tingkat SD, SMP, SMA, SMK	103.73	Dinas P & K
						APM PAUD, Tingkat SD, SMP, SMA, SMK		
			Pembangunan gedung sekolah	Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun	Terciptanya proses belajar yang nyaman dan tertib			Dinas P & K
			Pembangunan taman, lapangan upacara & fasilitas parkir					Dinas P & K
			Pembangunan perpustakaan sekolah					Dinas P & K

			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa					Dinas P & K
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa					Dinas P & K
			Pengadaan mebeluer sekolah					Dinas P & K
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah					Dinas P & K

DSTT.....51 LMBR

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Jambi tahun 2016, juga memuat rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Propinsi Jambi dan APBN tahun 2016, serta sumber pembiayaan lain.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.

[illegible]

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2013 – 2018 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014. RKPD Tahun 2016 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kota Jambi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2016 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Walikota beserta perangkat daerahnya pada tahun 2016 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2015 yang belum tercapai. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan.

Dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota Jambi diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah Kota Jambi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum yang disebut forum SKPD Kota Jambi atau forum gabungan SKPD Kota Jambi serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan pula penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Satuan kerja perangkat daerah Kota Jambi harus memiliki dokumen rencana kerja SKPD Kota Jambi (Renja SKPD) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, sesuai dengan RKPD Kota Jambi.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimanfaatkan secara efektif, efisien serta perlu disosialisasikan kepada semua *stakeholder* yang terkait untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaannya, sehingga RKPD Kota Jambi 2016 berfungsi sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman dan acuan yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan APBD Kota Jambi tahun 2016, baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
- (2) Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Jambi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
- (3) Sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Kota Jambi dalam rangka penyusunan RKPD ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah inipun dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi secara merata.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA